



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Jalan Raya Gandul Nomor 4, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok  
Telpon (021)7540077 - 7543708; Fax. (021) 7543708/09 7540124

---

**SAMBUTAN  
KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**  
Pada  
**PEMBUKAAN**

**PELATIHAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) ANGKATAN II,III dan IV  
METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BPSDM HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

***Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.  
Selamat Pagi, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om  
Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.***

***Salam Pembelajar***

Yang Saya Hormati :

- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM;
- Para Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM;
- Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal atau yang mewakili;
- Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal atau yang mewakili;
- Direktur POLTEKIM dan Direktur POLTEKIP;

- Para Administrator dan Koordinator serta Pengawas dan Sub Koordinator di lingkungan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Undangan; serta
- Para peserta Pelatihan Penyusunan LKjIP Angkatan II Metode PJJ Tahun Anggaran 2022 yang saya banggakan.

Mengawali sambutan ini, tidak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Penyusunan LKjIP Angkatan II Metode PJJ Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan secara virtual di tengah pandemi yang masih terjadi di negara kita.

Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan langkah pencegahan virus COVID-19, salah satunya dengan memberikan layanan vaksinasi terhadap seluruh pegawai secara bertahap, sebagai wujud kepedulian kepada ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar terhindar dari virus COVID-19 sehingga tetap dapat berkinerja dengan baik.

Sekaligus saya menghimbau kepada Saudara sekalian agar tetap konsisten dalam mematuhi Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan senantiasa menerapkan gerakan 5M (Mencuci tangan dengan sabun, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaksi dengan orang lain) dalam aktifitas sehari hari.

Sekaligus mari bersama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bangkit kembali dalam membangun perekonomian bangsa, Aamin Ya Rabbal Alamin.

### **Hadirin Sekalian yang berbahagia,**

Pelatihan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh atau *distance learning*, kembali diberlakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM di tahun 2022 ini, sebagai langkah atau strategi penyesuaian proses penyelenggaraan pelatihan dan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19.

Adapun penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh yang diselenggarakan ini mengacu kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 7/K.1//HKM.02.03/2020 tentang Kewaspadaan dan

Pencegahan Penularan Infeksi Virus Corona (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan.

Metode Pelatihan Jarak Jauh sudah dilakukan oleh BPSDM sejak tahun 2020 di mana pandemi baru melanda Indonesia pada saat itu.

Pelatihan Jarak Jauh pada prinsipnya sama dengan Pelatihan dalam bentuk Klasikal, yang membedakan hanyalah kondisi dan suasana belajarnya. Pelatihan yang biasanya diselenggarakan dalam bentuk klasikal kini berubah menjadi virtual, interaksi antara pengajar dan peserta yang semula bertatap muka secara langsung, kini berubah menjadi bertatap muka melalui layar monitor.

Saya berharap para peserta sekalian dapat membiasakan diri dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang memang sudah menjadi tuntutan dalam perkembangan pembelajaran saat ini.

### **Hadirin sekalian**

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan akuntabel serta memiliki produktivitas yang semakin baik dilingkungan instansi pemerintah, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, dan terukur yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat

ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Hadirin yang saya hormati,

Untuk penyempurnaan pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, telah dikeluarkan pedoman terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pedoman terbaru tersebut, disempurnakan format perencanaan dan pelaporan seperti tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT), tabel Penetapan Kinerja (PK), dan tabel Pengukuran Kinerja, serta ditekankan setiap instansi pemerintah dapat menyusun perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja yang lebih berorientasi kepada pencapaian kinerja (outcome). Yang mana tujuan Pelaporan Kinerja yaitu

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehingga dibutuhkan laporan yang jelas dan terperinci sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi serta mencegah terjadinya laporan palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**Hadirin yang saya hormati,**

Melalui Pelatihan ini, Peserta diharapkan mendapatkan tambahan ilmu bekal dalam melakukan tugas dan fungsinya, serta diharapkan terjadi penyamaan persepsi dalam proses penyusunan, sehingga akan terbentuk keseragaman penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada kesempatan ini juga, kami perlu mengingatkan Peserta pelatihan untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik selama mengikuti pelatihan. *Knowledge dan skill yang Saudara* peroleh tidak akan berarti jika tidak didukung dengan *attitude* yang baik. Jaga kekompakan serta

komunikasi yang baik dengan sesama peserta, penyelenggara, dan tenaga pengajar agar terbangun proses belajar yang efektif.

### **Hadirin yang berbahagia**

Mengakhiri sambutan ini, saya mengingatkan kembali janji kinerja kita dan mengajak terutama bagi para peserta pelatihan dan ASN Kemenkumham, mari “Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin Pasti dan Berakhlak Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural” untuk Mewujudkan Indonesia Maju.

Dengan mengucapkan “**Bismillahirrahmanirrahim**” Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Angkatan II Metode PJJ Tahun Anggaran 2022, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

***Wabillahi taufiq wal hidayah,***

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Depok, 15 Februari 2022  
Kepala BPSDM Hukum dan HAM,

Dr. Asep Kurnia  
NIP. 196611191986031001

